

Judul : Kewajiban Bagi Damayanti Untuk Membuka Semua  
Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2017  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 5

## ■ UCHOK SKY KHADAFI Aktivis LSM Kewajiban Bagi Damayanti Untuk Membuka Semua

DIREKTUR LSM Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai tepat langkah KPK yang memberikan predikat justice collaborator kepada anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.

Sebab, dengan pemberian prediket tersebut, terpidana kasus suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku ini, akhirnya bisa menyeret rekan-rekannya di DPR yang diduga juga terlibat.

"Akhirnya ada anggota Komisi V DPR lain yang ikut menjadi tersangka, seperti Musa Zainuddin dan Yudi Widiana," ujar Uchok di Jakarta, kemarin.

Menurut Uchok dengan mendapat keistimewaan sebagai justice collaborator dan dituntut rendah, sudah menjadi kewajiban bagi Damayanti untuk membuka semua pihak yang terlibat dalam kasus suap proyek jalan di Maluku.

"Kalau Damayanti tidak mau membongkar kasus itu, hukumannya harus diperberat," tegasnya.

Menurut Uchok, korupsi proyek jalan di Maluku yang diduga dilakukan beberapa anggota Komisi V DPR, pertanda bahwa mereka melakukan penyalahgunaan wewenang yang melekat pada anggota Dewan. Seperti, hak budget dan pengawasan. "Kedua hak ini disalahgunakan untuk menghambat pembangunan dengan cara

meminta bagian jatah dana APBN," tandasnya.

Dengan adanya praktek korupsi itu, dia meminta kepada KPK untuk lebih serius membongkar kasus korupsi ini di Kementerian PUPR. Terlebih, saat ini lembaga penegak hukum itu hanya menasar kalangan anggota Dewan dan swasta.

Agar kasus ini tidak berulang, Uchok menyarankan agar dilakukan dua cara. Pertama, para pelaku divonis seberat-beratnya, di atas 15 tahun penjara. Kedua, pembahasan anggaran antara DPR dengan Kementerian PUPR harus dibuka ke publik agar masyarakat juga tahu apa yang akan dikerjakan kementerian itu ke depan.

Sebab, saat ini, pembahasan anggaran di DPR ada yang terbuka dan ada yang tertutup. "Pihak DPR seolah masih curiga kepada rakyatnya sebagai pembayar pajak negeri ini," kritiknya.

Sementara, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga menyesalkan kembali ditetapkan anggota DPR sebagai tersangka perkara korupsi. Kali ini dari Komisi V DPR Musa Zainuddin dan Yudi Widiana sebagai tersangka proyek pembangunan jalan.

"Ini menambah daftar anggota Komisi V DPR yang ditetapkan menjadi tersangka," ujar Lucius di Jakarta, kemarin. ■ TIF